

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan dalam memperkuat kerangka pemikiran penelitian serta sebagai bahan perbandingan terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Kajian terhadap penelitian sebelumnya diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam penyusunan laporan laba rugi pada UMKM, serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang masih sering terjadi dalam praktik penyusunan laporan laba rugi.

1. Susilowati (2024) dalam penelitiannya yang berjudul *“Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Penyusunan Laporan Laba Rugi pada UMKM”* yang dipublikasikan dalam Jurnal Akuntansi UMKM, meneliti bagaimana penyusunan laporan laba rugi pada beberapa UMKM di wilayah Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum menyusun laporan laba rugi sesuai dengan ketentuan SAK EMKM. Permasalahan utama terletak pada pengakuan pendapatan yang masih berbasis kas sederhana serta pencatatan beban yang belum dikelompokkan secara sistematis. Akibatnya, laba bersih yang disajikan dalam laporan laba rugi belum mencerminkan kondisi keuangan usaha secara riil. Penelitian ini menegaskan bahwa kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi menjadi faktor dominan dalam ketidaksesuaian penyusunan laporan laba rugi.

2. Indria Yuli Susanti (2024) melalui penelitian berjudul “*Analisis Penyajian Laporan Laba Rugi, Pengakuan Pendapatan dan Beban UMKM Berdasarkan SAK EMKM*” yang diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, melakukan studi kasus pada UMKM sektor kuliner. Penelitian tersebut menemukan bahwa laporan laba rugi yang disusun oleh pelaku UMKM belum sepenuhnya memisahkan antara pendapatan usaha dan pendapatan lainnya, serta belum mencatat beban secara lengkap seperti beban penyusutan dan beban pajak. Hal ini menyebabkan perhitungan laba bersih menjadi kurang akurat. Penelitian ini juga menekankan bahwa penyusunan laporan laba rugi berdasarkan SAK EMKM dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan apabila dilakukan secara konsisten dan terstruktur.
3. Sitompul (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Penyusunan Laporan Laba Rugi UMKM Berdasarkan SAK EMKM*” yang dimuat dalam Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, menyatakan bahwa sebagian besar UMKM hanya mencatat total penjualan dan pengeluaran tanpa mengklasifikasikan jenis beban sesuai standar akuntansi. Penelitian ini menunjukkan bahwa laporan laba rugi yang tidak disusun berdasarkan SAK EMKM cenderung tidak menggambarkan kinerja keuangan secara komprehensif. Selain itu, tidak adanya perhitungan laba sebelum pajak dan laba setelah pajak menyebabkan informasi yang dihasilkan kurang informatif bagi pengambilan keputusan usaha.

4. Nurazizah (2022) dalam penelitian yang berjudul *“Implementasi SAK EMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan UMKM”* yang dipublikasikan pada Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, menemukan bahwa UMKM yang menerapkan SAK EMKM secara bertahap mengalami peningkatan kualitas dalam penyusunan laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang sebelumnya hanya berupa rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran berkembang menjadi laporan yang mencantumkan komponen pendapatan, beban usaha, serta perhitungan laba bersih secara sistematis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan SAK EMKM berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan laba rugi.
5. Neni Susanti (2022) melalui penelitiannya yang berjudul *“Pendampingan Penyusunan Laporan Laba Rugi Berdasarkan SAK EMKM pada UMKM”* yang diterbitkan dalam Jurnal Pengabdian dan Riset Akuntansi, menjelaskan bahwa setelah dilakukan pendampingan dan pelatihan akuntansi sederhana, UMKM mampu menyusun laporan laba rugi sesuai dengan struktur yang diatur dalam SAK EMKM. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara laporan laba rugi sebelum dan sesudah penerapan SAK EMKM, terutama dalam hal kelengkapan pencatatan beban serta ketepatan perhitungan laba bersih.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan laba rugi pada UMKM masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam pengakuan pendapatan, pencatatan beban, dan perhitungan laba bersih sesuai standar akuntansi. Meskipun

demikian, penerapan SAK EMKM terbukti mampu meningkatkan kualitas dan keandalan laporan laba rugi apabila diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keuangan berdasarkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan laba rugi UMKM pada Toko Buah Jambu Citra Refresh Tabalong Kabupaten Tabalong periode tahun 2025, guna mengetahui tingkat kesesuaian laporan laba rugi yang disusun dengan standar yang berlaku.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Defenisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha produktif yang memiliki peran besar dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, klasifikasi UMKM ditentukan secara kuantitatif melalui batas modal usaha dan hasil penjualan tahunan, yaitu: (1) Usaha Mikro dengan omzet $\leq$ Rp300 juta per tahun; (2) Usaha Kecil dengan omzet Rp300 juta– Rp2,5 miliar; dan (3) Usaha Menengah dengan omzet Rp2,5–50 miliar. Penetapan batasan kuantitatif ini digunakan sebagai dasar administratif dalam pendataan dan penetapan kebijakan pemerintah (UU 20/2008).

Berbagai definisi mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dijelaskan oleh berbagai institusi. Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa usaha mikro adalah

usaha yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha perseorangan dengan memenuhi kriteria tertentu. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang bersifat mandiri, dimiliki oleh individu atau badan usaha, dan tidak termasuk anak perusahaan atau bagian dari usaha menengah maupun besar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha produktif yang dikelola oleh individu atau badan usaha secara mandiri, tanpa keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil maupun besar, sesuai dengan jumlah kekayaan bersih atau pendapatan tahunan tertentu. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional telah meningkat selama beberapa dekade terakhir. Selain menawarkan peluang kerja baru, UMKM berkontribusi untuk pengurangan kesenjangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. UMKM dipandang sebagai mesin perekonomian nasional pertumbuhan karena mereka mempromosikan pendapatan devisa untuk negara melalui ekspansi ekspor produk UMKM ke pasar luar negeri.

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM yang dikutip dalam Aufar (2014:8), usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimum Rp200 juta, di luar tanah dan bangunan tempat usaha, dengan penjualan tahunan hingga Rp1 miliar. Usaha menengah, di sisi lain, mencakup usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp200 juta hingga Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Bank Indonesia dalam Aufar (2014:9) mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, baik dalam bentuk badan usaha perseorangan maupun berbadan hukum seperti koperasi.

Usaha ini tidak berafiliasi atau menjadi bagian dari usaha menengah atau besar. Kekayaan bersihnya tidak melebihi Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), dengan penjualan tahunan maksimum Rp200 juta. Untuk usaha menengah, kriteria kekayaan tetap bervariasi antara Rp200 juta hingga Rp500 juta untuk industri manufaktur, dan hingga Rp600 juta untuk industri non-manufaktur. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang berdiri sendiri dan tidak terafiliasi dengan perusahaan lain.

2. Peran UMKM

Kehadiran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menggairahkan berbagai sektor perekonomian. UMKM berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi di komunitas dan merupakan penyumbang utama perekonomian nasional. Seiring berjalannya waktu, UMKM telah terbukti menjadi sumber stabilitas yang dapat diandalkan selama masa krisis, karena mereka menciptakan kegiatan usaha serta memberikan keuntungan bagi perekonomian. Penguatan usaha mikro kecil menengah penguatan lanskap bisnis secara keseluruhan, yang pada gilirannya mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional. UMKM juga membantu pemerintah daerah mencapai otonomi pemerintahan secara maksimal. Satu diantaranya ialah amat sangat membantu dalam membimbing terhadap bangsa menuju kesejahteraan ialah pengembangan UMKM. Meningkatkan prospek lapangan kerja sekaligus memanfaatkan sumber daya manusia dan alam untuk meningkatkan perekonomian (Beny,

2016: 99-101). Pertumbuhan UMKM perlu didahulukan. Sebab, perusahaan-perusahaan tersebut menjadi tumpuan sistem perekonomian kerakyatan yang bertujuan tidak sekedar mengentaskan kemiskinan dan menyerap tenaga kerja.

Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi permasalahan kesenjangan pendapatan dan kelompok serta antar pelaku usaha. Perluasannya juga dapat memperluas basis perekonomian dan mempengaruhi perubahan struktural secara signifikan, antara lain memperkuat ketahanan perekonomian nasional dan daerah. dapat berdampak positif pada lingkungannya, yang dapat menghasilkan kesuksesan. Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha menguntungkan yang dikelola oleh perseorangan atau usaha menguntungkan yang memenuhi syarat sebagai usaha mikro (Rofi, 2024).

3. Kriteria UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan kriteria UMKM bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas agar kebijakan pemerintah dan penerapan standar akuntansi dapat disesuaikan dengan karakteristik usaha tersebut (Tambunan, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kriteria UMKM dibedakan berdasarkan nilai kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000. Kriteria ini mencerminkan skala usaha yang masih sangat terbatas dan umumnya dikelola secara sederhana oleh pemilik usaha (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020).

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000. Pada skala ini, usaha mulai menunjukkan perkembangan dalam aktivitas operasional dan membutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur (Sari & Putra, 2021).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000. Usaha menengah umumnya telah memiliki struktur organisasi yang lebih jelas serta aktivitas usaha yang semakin kompleks, sehingga memerlukan penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis dan sesuai standar akuntansi (Susanti,

2022).

Dalam konteks akuntansi, pengelompokan UMKM berdasarkan kriteria tersebut sangat penting karena berpengaruh terhadap standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disusun khusus untuk mengakomodasi karakteristik UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pemahaman akuntansi. Dengan adanya kriteria UMKM yang jelas, penerapan SAK EMKM diharapkan mampu membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, secara lebih sederhana namun tetap andal dan relevan (IAI, 2016; Febriyani, 2022).

4. Peran Penting UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam struktur perekonomian nasional. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta berkontribusi dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penopang ekonomi rumah tangga, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas ekonomi di tingkat lokal dan daerah (Tambunan, 2020).

UMKM berperan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Karakteristik UMKM yang padat karya memungkinkan sektor ini menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang beragam. Hal ini menjadikan UMKM sebagai solusi strategis dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, khususnya di daerah-

daerah yang memiliki keterbatasan lapangan kerja formal (Sarfiyah, Atmaja, & Verawati, 2019).

Selain perannya dalam penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Aktivitas produksi dan distribusi yang dilakukan oleh UMKM secara agregat memberikan sumbangan yang besar terhadap output nasional. UMKM terbukti mampu bertahan dan tetap beroperasi pada saat terjadi krisis ekonomi, sehingga menjadi sektor yang relatif stabil dan resilien dibandingkan usaha berskala besar (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021).

UMKM juga memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah. Sebagian besar UMKM beroperasi di daerah pedesaan dan perkotaan kecil, sehingga keberadaannya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Melalui pengembangan UMKM, potensi ekonomi lokal dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan (Sukirno, 2020).

Dalam konteks pengembangan kewirausahaan, UMKM berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian ekonomi. UMKM mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang mampu menciptakan produk dan jasa berbasis potensi lokal. Dengan demikian, UMKM tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang mendorong daya saing ekonomi daerah (Winarno & Hermana, 2021).

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar. Keterbatasan pemahaman akuntansi menyebabkan banyak UMKM belum mampu menyajikan laporan keuangan yang akurat dan andal. Oleh karena itu, penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) menjadi sangat penting untuk mendukung peran UMKM agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (Febriyani, 2022; IAI, 2016).

2.2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Krcil dan Menengah (SAK EMKM)

1. Pengertian SAK EMKM

Pelaporan keuangan yang kredibel merupakan pondasi penting bagi keberlanjutan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM). SAK EMKM didefinisikan sebagai sistem akuntansi keuangan di Indonesia yang dirancang secara spesifik untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Standar ini diterbitkan oleh IAI pada tanggal 24 Oktober 2016, dan mulai berlaku efektif secara nasional per 1 Januari 2018, meskipun IAI sangat menganjurkan penerapan dini. Kehadiran SAK EMKM menempatkannya pada kedudukan paling sederhana dalam hierarki standar akuntansi di Indonesia, secara fundamental memuat pengaturan akuntansi yang jauh lebih ringkas dan praktis dibandingkan kerangka yang lebih luas, seperti Standar Akuntansi Keuangan

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) adalah standar akuntansi yang secara khusus disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas berskala kecil yang tidak memiliki kompleksitas transaksi seperti perusahaan besar. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2016), SAK EMKM dirancang agar UMKM dapat menyusun laporan keuangan yang relevan, dapat dipahami, dan memiliki kualitas informasi yang memadai tanpa memerlukan kemampuan teknis yang tinggi. Standar ini merupakan bentuk penyederhanaan dari SAK ETAP dan PSAK, karena mayoritas UMKM di Indonesia tidak memiliki tenaga akuntansi profesional serta tidak melakukan transaksi akuntansi kompleks seperti penggabungan usaha, instrumen derivatif, valuasi aset dengan nilai wajar, atau konsolidasi laporan keuangan.

Secara historis, SAK EMKM hadir sebagai respons atas fenomena rendahnya tingkat literasi akuntansi pelaku UMKM. Penelitian JRABI (2020) menyatakan bahwa sebelum diterbitkannya SAK EMKM, sebagian besar UMKM di Bantul tidak memiliki acuan pencatatan yang jelas sehingga laporan yang dibuat cenderung tidak lengkap dan sulit digunakan sebagai bahan evaluasi usaha. Hal serupa ditemukan oleh JRAK (2023), yang menjelaskan bahwa pelaku UMKM sering kali hanya mencatat pendapatan dan pengeluaran tanpa mengelompokkan pos-pos keuangan sesuai standar sehingga informasi yang dihasilkan kurang akurat. Dengan demikian, SAK EMKM bukan hanya standar akuntansi, tetapi juga alat pemberdayaan UMKM agar mampu

menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tujuan dan Manfaat SAK EMKM

Tujuan utama penyusunan SAK EMKM adalah memberikan panduan yang sederhana, aplikatif, dan relevan bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan. IAI (2016) menjelaskan bahwa SAK EMKM membantu UMKM menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti penilaian likuiditas, profitabilitas, serta kemampuan entitas dalam menjalankan operasional secara berkelanjutan. Standar ini juga memastikan bahwa pelaporan dilakukan secara konsisten dari periode ke periode sehingga memudahkan pemilik usaha melakukan evaluasi performa usahanya.

Selain memberikan manfaat bagi internal usaha, SAK EMKM juga memberikan manfaat signifikan bagi pihak eksternal seperti bank dan lembaga pembiayaan. Menurut penelitian JRAK (2023), UMKM yang menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM memperoleh kemudahan dalam proses pengajuan kredit karena laporan keuangan dianggap lebih kredibel, dapat dipercaya, dan memenuhi persyaratan administratif lembaga keuangan. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa pelaku UMKM yang menerapkan SAK EMKM mengalami peningkatan rasio keberhasilan pinjaman hingga 32% dibanding pelaku usaha yang tidak memiliki laporan keuangan standar.

3. Komponen Laporan Keuangan SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 24 Oktober 2016. Menurut SAK EMKM (2016:1) “EMKM adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP, yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya - tidaknya selama 2 tahun berturut - turut.” Akan tetapi EMKM ini baru berlaku dan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018. SAK EMKM menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehan. Dalam SAK EMKM tidak ada pos secara khusus mengenai format dan aturan baku mengenai laporan yang disajikan.

Di dalam laporan keuangan SAK EMKM, laporan keuangan hanya terbagi menjadi 3 laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). SAK EMKM mengatur tiga komponen utama laporan keuangan, yaitu: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Setiap komponen memiliki fungsi spesifik dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh pengguna laporan.

4. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Komponen ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai sumber daya yang dimiliki serta kewajiban yang harus dipenuhi. Javanica (2022) menegaskan bahwa penyajian laporan posisi keuangan menjadi tantangan utama bagi UMKM karena banyak pelaku usaha tidak terbiasa mengelompokkan aset ke dalam kategori lancar dan tidak lancar. Penelitian tersebut menemukan bahwa 68% UMKM belum melakukan pencatatan aset tetap secara benar, terutama dalam hal penghitungan penyusutan.

5. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, serta laba atau rugi yang diperoleh entitas dalam suatu periode akuntansi tertentu. Laporan ini berfungsi untuk menggambarkan kinerja keuangan suatu usaha dan menjadi dasar dalam menilai kemampuan UMKM dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi sangat penting bagi pemilik usaha dalam pengambilan keputusan ekonomi, perencanaan usaha, serta evaluasi keberlanjutan usaha (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Bagi UMKM, laporan laba rugi memiliki peran strategis karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi operasional dan tingkat profitabilitas usaha. Dengan adanya laporan laba rugi yang disusun secara sistematis, pelaku

UMKM dapat mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh, jenis serta jumlah beban yang dikeluarkan, serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan dalam satu periode. Informasi ini dapat digunakan untuk mengendalikan biaya, menentukan harga jual, serta merencanakan pengembangan usaha di masa mendatang (Sukirno, 2020).

Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang belum menyusun laporan laba rugi sesuai dengan kaidah akuntansi. Menurut JABKES (2022), permasalahan yang sering ditemukan pada UMKM adalah pencampuran antara transaksi pribadi dan transaksi usaha, sehingga penghitungan pendapatan dan beban menjadi tidak akurat. Kondisi tersebut menyebabkan laba atau rugi yang dihasilkan tidak mencerminkan kinerja keuangan usaha yang sebenarnya dan menyulitkan pemilik usaha dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) hadir sebagai pedoman bagi UMKM dalam menyusun laporan laba rugi secara sederhana, relevan, dan mudah dipahami. SAK EMKM mengatur pengakuan pendapatan dan beban dengan prinsip yang lebih praktis, sehingga membantu pelaku UMKM dalam memisahkan beban usaha dan beban bukan usaha. Dengan penerapan SAK EMKM, laporan laba rugi UMKM diharapkan dapat disusun secara lebih tertib, akurat, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Penyusunan laporan laba rugi berdasarkan SAK EMKM juga dapat meningkatkan kredibilitas UMKM di mata pihak eksternal, seperti lembaga keuangan dan investor. Laporan laba rugi yang disusun sesuai standar memberikan informasi yang andal mengenai kinerja keuangan usaha, sehingga memudahkan UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan dan mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Febriyani, 2022).

6. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian akun-akun penting, serta informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan secara menyeluruh. Meskipun CALK termasuk komponen paling sederhana dalam SAK EMKM, namun penelitian RAAR (2023) menunjukkan bahwa 75% UMKM tidak menyusun CALK karena menganggapnya tidak penting atau tidak tahu cara penyusunannya.

Gambar 2.1 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Berdasarkan SAK EMKM

Entitas Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 31 Oktober 2025		
10. Pendapatan Penjualan	2025	2024
Penjualan		
Retur Penjualan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
11. Beban Lain-lain		
Bunga Pinjaman	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
12. Beban Pajak Penghasilan		
Pajak Penghasilan	xxx	xxx

Pajak Penghasilan	xxx	xxx
-------------------	-----	-----

Sumber (IAI, 2022)

7. Perbedaan SAK EMKM pada SAK lain

SAK EMKM memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan standar akuntansi lainnya seperti PSAK dan SAK ETAP. Perbedaan ini terutama terlihat dari kompleksitas, ruang lingkup pengaturan, hingga kebutuhan administrasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Menurut JRABI (2020) dan IAI (2016), PSAK disusun untuk entitas besar yang memiliki transaksi keuangan rumit, seperti konsolidasi laporan keuangan, penggunaan instrumen keuangan derivatif, valuasi aset menggunakan nilai wajar, serta transaksi yang melibatkan banyak entitas. Sebaliknya, SAK EMKM tidak mengatur transaksi-transaksi tersebut karena tidak relevan bagi UMKM yang secara umum memiliki kegiatan usaha sederhana dan tidak membutuhkan pengukuran aset atau kewajiban menggunakan metode kompleks.

Selain itu, terdapat perbedaan yang jelas dalam jumlah laporan keuangan yang wajib disusun. Pada PSAK maupun SAK ETAP, entitas diwajibkan menyusun laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi komprehensif, serta pengungkapan yang sangat luas pada catatan atas laporan keuangan. Sebaliknya, SAK EMKM hanya mewajibkan tiga laporan inti, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang isinya sangat sederhana.

Penyederhanaan ini bertujuan agar UMKM yang tidak memiliki sumber daya manusia dengan latar belakang akuntansi tetap dapat menyusun laporan keuangan yang layak. Dari sisi pengungkapan, PSAK mengharuskan perusahaan menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan rincian akun secara mendalam, sehingga membutuhkan tenaga akuntansi profesional untuk memenuhinya. Berbanding terbalik, SAK EMKM dirancang dengan tingkat pengungkapan minimal, hanya mencakup informasi pokok yang diperlukan bagi pengguna laporan, seperti dasar penyusunan laporan, kebijakan sederhana, serta informasi tambahan terkait akun- akun utama. Karena tingkat kerumitannya rendah, pemilik UMKM yang tidak memiliki pendidikan formal akuntansi pun masih dapat menerapkan SAK EMKM secara mandiri tanpa memerlukan bantuan tenaga akuntan profesional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara SAK EMKM dan standar akuntansi lain tidak hanya terletak pada jumlah laporan yang disusun, tetapi juga pada tingkat detail, kedalaman pengungkapan, dan kemampuan teknis yang diperlukan dalam penyusunannya. Penyederhanaan ini sepenuhnya selaras dengan kebutuhan UMKM di Indonesia yang menghadapi banyak keterbatasan dalam pencatatan keuangan.

8. Tantangan UMKM dalam Menerapkan SAK EMKM

Walaupun SAK EMKM dibuat dengan tujuan untuk menyederhanakan proses pencatatan bagi UMKM, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Salah satu tantangan

terbesar adalah rendahnya tingkat literasi akuntansi pelaku UMKM. RAAR (2023) mencatat bahwa sekitar 80% UMKM belum memahami cara mencatat penyusutan aset tetap, padahal pencatatan aset merupakan komponen penting dalam laporan posisi keuangan. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan laporan keuangan yang disusun tidak menggambarkan kondisi usaha secara akurat, terutama dalam hal penilaian aset dan kewajiban. Selain itu, banyak UMKM yang tidak melakukan pencatatan transaksi secara rutin.

JRAK (2023) menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran secara global tanpa dokumentasi harian yang jelas. Akibatnya, ketika tiba waktu penyusunan laporan keuangan, data yang tersedia tidak lengkap sehingga laporan yang dihasilkan tidak memenuhi ketentuan SAK EMKM. Kebiasaan mencatat secara manual atau tidak sama sekali juga menyebabkan kesalahan dalam penggolongan akun.

Tantangan lain datang dari minimnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga terkait. Walaupun pelaku UMKM sering menjadi sasaran program bantuan, pelatihan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan masih sangat terbatas. JABE (2021) mencatat bahwa mayoritas peserta UMKM belum pernah mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM, sehingga mereka sering kali tidak mengetahui format dan prosedur standar. Keterbatasan ini membuat pemilik usaha menganggap laporan keuangan sebagai beban administratif tambahan yang sulit dilakukan.

Selain faktor kemampuan, keterbatasan waktu dan tenaga juga menjadi hambatan utama. Banyak UMKM dijalankan oleh satu atau dua orang saja, sehingga pemilik usaha harus mengelola pemasaran, produksi, pelayanan, hingga administrasi. Kondisi ini membuat pencatatan keuangan bukan menjadi prioritas. Mereka cenderung fokus pada kegiatan operasional harian dan menunda pencatatan sampai akhir periode, yang akhirnya menyebabkan laporan keuangan tidak akurat.

Komponen Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang paling sulit disusun oleh UMKM. Penelitian JABKES (2022) menyatakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak memahami apa saja informasi yang harus diungkapkan dalam CALK, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan, penjelasan akun penting, atau rincian piutang dan persediaan. Padahal CALK menjadi bagian penting untuk memberikan konteks terhadap laporan keuangan utama. Secara keseluruhan, tantangan UMKM dalam menerapkan SAK EMKM bukan hanya berasal dari kurangnya pemahaman teknis, tetapi juga budaya pencatatan yang belum terbentuk, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya dukungan pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM memerlukan pendekatan yang lebih sistematis, termasuk pelatihan berkelanjutan dan pendampingan intensif agar UMKM mampu menerapkannya secara konsisten.

Gambar 2.2 Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2025			
Aset	Catatan	2025(Rp)	2024 (Rp)
Kas dan Setara Kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
Jumlah Kas dan Setara Kas		xxx	xxx
Piutang Usaha	6	xxx	xxx
Persediaan			
Beban Bayar di Muka	7	xxx	xxx
Aset Tetap		xxx	xxx
Aakumulasi Pentusutan		(xx)	(xx)
Jumlah Aset		xxx	xxx
Liabilitas			
Utang Usaha		xxx	xxx
Utang Bank	8	xxx	xxx
Jumlah Liabilitas		xxx	xxx
Ekuitas			
Modal		xxx	xxx
Saldo Laba (Defisit)	9	xxx	xxx
Jumlah Ekuitas		xxx	xxx
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		xxx	xxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2022)

2.2.3 Laporan laba rugi

1. Pengertian Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan salah satu komponen utama dalam laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan ini memuat ringkasan pendapatan dan beban yang terjadi selama satu periode akuntansi, sehingga menghasilkan informasi laba atau rugi bersih yang diperoleh oleh usaha. Bagi UMKM, laporan laba rugi berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya (Kasmir, 2021).

Laporan laba rugi memiliki peran yang sangat penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas operasional usaha. Melalui laporan ini, pemilik UMKM dapat mengetahui sumber pendapatan utama, jenis beban yang paling dominan, serta tingkat profitabilitas usaha yang dijalankan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemilik usaha dalam pengambilan keputusan, seperti perencanaan biaya, penentuan harga jual, serta pengembangan usaha di masa yang akan datang (Hery, 2020).

Dalam praktiknya, banyak UMKM yang masih mengalami kendala dalam penyusunan laporan laba rugi secara tepat. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah pencampuran antara transaksi pribadi dan transaksi usaha, sehingga laba yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi keuangan usaha yang sebenarnya. Kondisi ini menyebabkan laporan laba rugi menjadi kurang akurat dan sulit digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan (JABKES, 2022).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) hadir sebagai pedoman yang dirancang khusus untuk membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan secara sederhana namun tetap andal. Dalam SAK EMKM, laporan laba rugi disusun dengan format yang lebih ringkas dan mudah dipahami, serta hanya memuat unsur-unsur yang bersifat material dan relevan bagi UMKM. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha dapat menyusun laporan keuangan secara mandiri tanpa memerlukan pengetahuan akuntansi yang kompleks (IAI, 2018).

Berdasarkan SAK EMKM, laporan laba rugi sekurang-kurangnya mencakup

unsur pendapatan, beban usaha, dan laba atau rugi selama periode berjalan. Pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi penjualan barang atau jasa, sedangkan beban diakui pada saat terjadinya pengorbanan ekonomi yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Penyajian laporan laba rugi yang sesuai dengan SAK EMKM diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja keuangan UMKM secara lebih objektif, transparan, dan dapat dibandingkan antarperiode (Sari & Nugroho, 2021).

Dengan tersusunnya laporan laba rugi yang sesuai dengan standar akuntansi, UMKM dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya. Laporan laba rugi yang akurat tidak hanya bermanfaat bagi pemilik usaha, tetapi juga bagi pihak eksternal seperti kreditur, investor, dan pemerintah dalam menilai kinerja serta kelayakan usaha. Oleh karena itu, penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan laba rugi menjadi langkah strategis bagi UMKM untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha secara berkelanjutan (Putri & Wahyuni, 2020).

Gambar 2.3 Penyusunan Laporan Laba Rugi Berdasarkan SAK EMKM

Laporan Laba Rugi 31 Oktober 2025			
Uraian	Catatan	2025(Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan Lain-lain		xxx	xxx
Jumlah Pendapatan		xxx	xxx
Beban			
Beban Usaha		xxx	xxx
Beban Lain-lain	11	xxx	xxx
Jumlah Beban		xxx	xxx
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		xxx	xxx

Beban Pajak Penghasilan	12	xxx	xxx
Laba (Rugi) Setelah Pajak Penghasilan		xxx	xxx

2. Unsur-Unsur Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi tersusun atas beberapa unsur utama yang saling berkaitan dalam menggambarkan kinerja keuangan suatu entitas. Unsur-unsur tersebut meliputi pendapatan, beban, serta laba atau rugi bersih yang diperoleh selama satu periode akuntansi. Setiap unsur memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang relevan mengenai hasil aktivitas operasional UMKM (Hery, 2020).

Pendapatan merupakan arus masuk manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas utama usaha, seperti penjualan barang atau jasa. Bagi UMKM, pendapatan menjadi indikator utama keberhasilan usaha dalam menghasilkan nilai ekonomi. Pendapatan yang dicatat secara tepat akan mencerminkan tingkat aktivitas usaha dan menjadi dasar dalam penghitungan laba bersih (Sukirno, 2020). Beban merupakan pengorbanan ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi untuk memperoleh pendapatan. Beban dalam UMKM dapat berupa beban pembelian bahan baku, beban gaji, beban listrik, beban sewa, serta beban operasional lainnya. Pengakuan dan pencatatan beban yang tidak tepat akan menyebabkan laba atau rugi yang dihasilkan menjadi bias dan tidak mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya (Putri & Wahyuni, 2020).

Laba atau rugi bersih merupakan selisih antara pendapatan dan beban dalam satu periode. Laba menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan beban, sedangkan rugi menunjukkan kondisi sebaliknya. Informasi laba atau rugi bersih sangat penting bagi pelaku UMKM sebagai dasar evaluasi kinerja usaha dan pengambilan keputusan strategis di masa mendatang (Sari & Nugroho, 2021)

3. Penyusunan Laporan Laba Rugi Berdasarkan SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) memberikan pedoman sederhana dalam penyusunan laporan laba rugi agar dapat diterapkan oleh pelaku UMKM secara mudah dan praktis. Penyederhanaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan UMKM dalam menyusun laporan keuangan tanpa mengurangi kualitas informasi yang disajikan (IAI, 2018). Dalam SAK EMKM, laporan laba rugi disusun dengan prinsip akrual sederhana, di mana pendapatan diakui pada saat diperoleh dan beban diakui pada saat terjadi. Format laporan laba rugi dalam SAK EMKM disajikan secara ringkas dengan memuat unsur-unsur utama yang bersifat material, sehingga memudahkan pelaku UMKM dalam memahami kinerja keuangan usahanya (Febriyani, 2022).

Penyusunan laporan laba rugi berdasarkan SAK EMKM juga menekankan pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Pemisahan ini menjadi aspek penting karena masih banyak UMKM yang mencampurkan transaksi pribadi dengan transaksi usaha, sehingga menyebabkan informasi laba menjadi tidak akurat. Dengan penerapan SAK

EMKM, laporan laba rugi diharapkan dapat mencerminkan kondisi keuangan usaha yang sebenarnya (JABKES, 2022).

Selain itu, laporan laba rugi yang disusun sesuai SAK EMKM dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan UMKM. Informasi keuangan yang tersaji secara sistematis dan sesuai standar akan mempermudah pihak internal maupun eksternal dalam menilai kinerja usaha, serta mendukung UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan dan pengembangan usaha (Susilowati, 2024).

4. Laporan Laba Rugi sebagai Alat Analisis Kinerja Keuangan UMKM

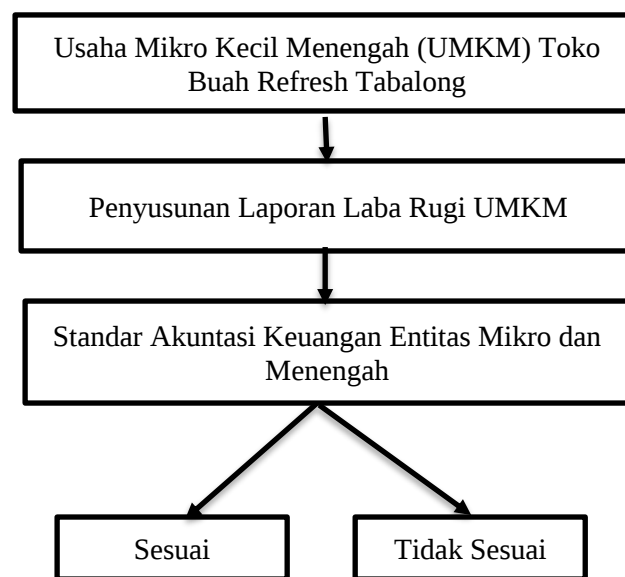
Laporan laba rugi tidak hanya berfungsi sebagai laporan keuangan, tetapi juga sebagai alat analisis kinerja keuangan UMKM. Melalui laporan laba rugi, pelaku usaha dapat menilai tingkat profitabilitas, efisiensi biaya, serta kemampuan usaha dalam mempertahankan keberlangsungan operasionalnya. Analisis terhadap laporan laba rugi memungkinkan UMKM untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan dalam kegiatan usaha (Kasmir, 2021).

Bagi UMKM, analisis laporan laba rugi sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Informasi laba yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan anggaran, evaluasi strategi penjualan, serta pengendalian biaya operasional. Dengan demikian, laporan laba rugi yang disusun berdasarkan SAK EMKM dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM (Nurazizah, 2022).

Dalam konteks penelitian ini, analisis laporan laba rugi UMKM Toko Buah Jambu Citra Refresh Tabalong dilakukan untuk menilai kesesuaian penyusunan laporan laba rugi dengan ketentuan SAK EMKM. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas laporan laba rugi yang disusun serta menjadi dasar rekomendasi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan UMKM agar lebih akurat dan sesuai standar.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.4 kerangka konseptual



Sumber: Diolah Peneliti 2026

Penerapan SAK EMKM menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan adanya standar yang jelas, pelaku usaha diharapkan mampu menyusun laporan keuangan secara lebih tertib dan akurat.

Penerapan SAK EMKM dalam penelitian ini diukur melalui beberapa indikator, yaitu penyusunan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, serta pengakuan dan pengukuran akun. Keempat indikator tersebut mencerminkan sejauh mana Toko Buah Refresh Tabalong telah menerapkan prinsip-prinsip SAK EMKM dalam aktivitas pencatatan dan pelaporan keuangannya. Semakin baik tingkat penerapan standar tersebut, maka proses penyusunan laporan keuangan akan semakin konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen diukur berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan, meliputi kesesuaian dengan SAK EMKM, keandalan informasi, relevansi informasi, kemudahan untuk dipahami, serta ketepatan penyajian. Kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM yang baik akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi pemilik usaha dalam pengambilan keputusan serta mendukung keberlanjutan usaha Toko Buah Refresh Tabalong.